

**KEWASPADAAN NASIONAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT,
BERBANGSA DAN BERNEGARA
ANTISIPASI TERHADAP KONFLIK SOSIAL¹
putu sastrawingarta²**

Pendahuluan

Kewaspadaan Nasional adalah bagian dari system nasional dalam penyelenggaraan negara, untuk menjamin kelangsungan kehidupan nasionalnya dari berbagai bentuk ancaman. Negara sendiri adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara, Fredrik Ratzel dalam teori ruang hidup atau *lebensraum*nya memberi peringatan terhadap eksistensi sebuah negara dalam sebuah kekuasaannya yang berdaulat. Awalnya *Lebensraum* berperan sebagai motivasi kebijakan ekspansionis Jerman Nazi yang bertujuan memberikan ruang tambahan untuk pertumbuhan penduduk Jerman demi terciptanya Jerman Raya. Menurut Ratzel, prinsip utama manusia dalam menjamin kelangsungan hidupnya setelah menduduki suatu wilayah, perlu untuk mengokupasi wilayah lain untuk mendapatkan wilayah yang lebih luas lagi. Berdasar teori ini Jerman lalu mencoba mengokupasi Rusia walau gagal dan juga mengokupasi Polandia tahun 1939 dan melahirkan pecahnya Perang dunia ke II

Dalam perkembangannya Istilah "*lebensraum*" juga dipakai untuk menyebut banyak negara pasca perang. Penyebaran kapitalisme global oleh Amerika Serikat disebut "*Lebensraum* Amerika", dan telah dikritik sebagai bentuk imperialisme ekonomi dan budaya. Tsering Shakya menulis bahwa kebijakan Republik Rakyat Tiongkok di Tibet juga bisa disamakan dengan *lebensraum*³ Atas dasar pengertian itu, maka setiap negara berdaulat yang ada didunia akan menyelenggarakan konsep kewaspadaan nasional masing-masing negaranya dalam mengantisipasi ancaman yang dapat memberi pengaruh negative terhadap keberlangsungan hidup negaranya dari praktek *lebensraum* negara lain. Begitu juga dengan Indonesia dengan konsep kewaspadaan nasionalnya. Kesalahan dalam mempersepsi dan memformulasi ancaman, berpengaruh besar terhadap keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Taruhannya adalah keamanan, keselamatan dan kedaulatan negara, yang bahkan bisa bermuara pada negara rapuh atau negara gagal (*failed state*), seperti dialami beberapa negara didunia yang sampai saat ini masih berkutut sebagai negara rapuh. Contohnya; Syria, Yaman, Somalia, Irak dan beberapa negara lain yang cukup menderita akibat praktek *lebensraum* negara-negara adikuasa.

¹ Materi ceramah Untuk ToT Virtual Taplai Kebangsaan bagi Dosen,Guru,Widyaiswara Angkatan II Lemhannas RI Tahun 2021

² Mayjen TNI (Purn) Taprof Padnas dan Ideologi Lemhannas RI

³[https://id.wikipedia.org/wiki/Lebensraum#:~:text=Lebensraum%20\(bantuan%C2%B7info\)%20\(,komponen%20penting%20dalam%20ideologi%20Nazi.](https://id.wikipedia.org/wiki/Lebensraum#:~:text=Lebensraum%20(bantuan%C2%B7info)%20(,komponen%20penting%20dalam%20ideologi%20Nazi.)

Dalam rangka menjamin kelangsungan hidupnya, Indonesia sebagai negara sudah tentu harus melaksanakan konsep kewaspadaan nasionalnya agar bisa mengantisipasi dan terhindar dari berbagai bentuk ancaman dalam penyelenggaraan negaranya. Permasalahannya; *bagaimana konsep kewaspadaan nasionalnya itu dilaksanakan berdasar persepsinya terhadap ancaman ditengah perkembangan lingkungan strategis yang dihadapinya, paham keamanan nasional yang dianut, konstitusi yang berlaku serta consensus dasar berbangsa dan bernegara yang harus dipedomani.*

Kewaspadaan Nasional dan Persepsi Terhadap Ancaman

- **Basisnya Adalah Intelijen**

Kewaspadaan Nasional basis teorinya adalah Intelijen Negara. Yang dimaksud intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara. Semua organisasi intelijen di dunia pada hakekatnya melakukan bisnis utama (*core business*) yang berurusan dengan informasi dan ancaman untuk memastikan keamanan nasional. Intelijen menjadi garis depan dari keamanan nasional. Karena itu, kewaspadaan nasional menjadi factor utama dari system keamanan nasional. Seperti dikatakan dalam Undang-Undang No 17 tahun 2011 tentang intelijen, dikatakan bahwa intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional

Teori dasar ilmu intelijen yang dicetuskan oleh Sun Tsu, antara lain

“...siapa yang memahami diri sendiri dan diri lawan secara mendalam , berada dijalan kemenangan pada suatu pertempuran. Siapa yang memahami diri sendiri tetapi tidak memahami lawannya, hanya berpeluang hanya berpeluang sama besarnya untuk menang (dengan lawannya). Siapa yang tidak memahami dirina sendiri maupun lawannya, berada pada jalan untuk hancur dalam semua pertempuran... Kenali musuh anda, kenali diri anda dan kemenangan anda tidak terancam. Kenali lapangan, kenali cuaca dan kemenangan anda akan lengkap... saya akan mampu meramalkan pihak mana yang akan memang, dan pihak mana yang akan kalah.... Dalam menilai sesuatu maka ada tiga factor yang harus di dianalisa, yaitu factor diri, factor musuh dan factor lingkungan”⁴

- **Keamanan Negara dan Keamanan Insani**

⁴ Wahyu Saronto, 2018, Intelijen, Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan,

Menghadapi praktek “lebensraum” dari negara lain terhadap kedaulatan Indonesia yang berpotensi mengancam keberlangsungan kehidupan nasional, konsep kewaspadaan nasional disiapkan untuk itu. Perspektifnya adalah keamanan nasional dengan keamanan negara (*state security*) dan atau keamanan insani (*human security*). Dominasi keamanan negara dan atau keamanan insani didalam mengaplikasikan keamanan nasional sangat tergantung dari penafsiran setiap negara menurut konstitusi atau ideology setiap negara. Domain keamanan negara biasanya dilakukan oleh negara-negara berkembang atau negara ketiga sejalan dengan implementasinya dalam pembangunan ekonomi yang mengetrapkan ekonomi pembangunan ala negara-negara sosialis atau komunis. Dalam keadaan begini, peranan campur tangan negara akan lebih dominan yang didalam mengetrapkan perekonomiannya lebih condong kepada perekonomian *Keynesianisme*, atau ekonomi ala Keynes. Berbeda dengan negara-negara yang sudah lebih maju demokrasinya atau negara-negara kapitalis-liberalis yang mengedepankan keamanan insani dengan lebih memilih ekonomi *laissez-faire*, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara.

Kasus Indonesia sebagai negara ketiga, perspektif keamanan nasionalnya sejak awal kemerdekaannya sampai dengan era orde baru, domain keamanan negara lebih terlihat dibandingkan keamanan insani. Indikasinya jelas dalam Undang-Undang 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, yang berlaku pada era orde baru, dengan mengintegrasikan TNI dan Polri dalam ABRI. Pada saat orde reformasi, ketika UU No 20 tahun 1982 sudah tidak lagi berlaku diganti dengan UU No. 3 Tahun 2002. Tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI, sebagai tindak lanjut dari pemisahan TNI dan Polri sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI, domain negara dikurangi diganti dengan domain keamanan insani. Indikasinya jelas dituangkan sejak RPJMN 2015-2019 yang menyatakan bahwa:

“...konsep keamanan nasional difokuskan pada keamanan insani. Konsep ini bersifat inklusif dan partisipatoris, dimana keamanan tradisional atau keamanan negara tidak bisa lagi dipandang sebagai satu ranah yang terpisah, melainkan semakin erat kaitannya dengan keamanan non tradisional lainnya, seperti keamanan energi, maritim dan pangan. Selain itu, personilnya semakin beragam dan tidak terkonsentrasi pada satu institusi saja, namun membutuhkan kemitraan lintas sector”

Kehadiran undang-undang intelijen di era reformasi, menunjukkan bahwa terjadi pergeseran arah dari domain keamanan negara menuju keamanan insani. Kehadiran UU 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara juga menunjukkan bahwa intelijen yang menjadi lini terdepan keamanan nasional harus tetap dibawah control civil dalam masyarakat sipil (*civil society*). Undang-undang itu akan menjamin praktek-praktek intelijen yang profesional namun tetap dalam koridor supremasi hukum negara demokrasi. Kewaspadaan Nasional yang menggunakan basis teorinya Intelijen Negara tidak bisa mengabaikan undang-undang itu dalam memformulasi dan mempersepsikan ancaman. Begitu juga dalam memperoleh informasi dalam setiap kegiatannya. Selain kehadiran undang-undang intelijen, amandemen atau perubahan kedua UUD NRI 1945 pada Bab XA berkaitan dengan hak Azasi Manusia yang menghasilkan Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J menunjukkan pergeseran keamanan negara menuju keamanan insani. Kondisi ini memberi pengaruh terhadap pelaksanaan konsep kewaspadaan nasional kekinian.

- **Konsep Kewaspadaan Nasional dan Persepsi Terhadap Ancaman**

Berpegang pada tuntutan untuk selalu berdasarkan consensus dasar bangsa dan negara, perlunya mengelola informasi agar dapat memformulasi ancaman yang dihadapi bangsa dan negara, maka Lemhannas RI mendefinisikan konsep kewaspadaan nasional (Padnas) sebagai sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya dari suatu ancaman. Padnas juga sebagai suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Padnas dapat juga diartikan sebagai manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa/NKRI. Oleh karena itu Padnas harus bertolak dari keyakinan ideologis dan nasionalisme yang kukuh serta perlu didukung oleh usaha-usaha pemantauan sejak dini dan terus menerus terhadap berbagai implikasi dari situasi serta kondisi yang berkembang baik di dalam maupun di luar negeri.⁵

Berdasarkan pengertian diatas, maka secara substansi kewaspadaan nasional sangat menekankan arti penting dari nilai persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Pentingnya integrasi nasional, pentingnya nasionalisme. Nasionalisme yang *Le Desir D'etre Ensemble*, nasionalisme yang kuat kehendaknya untuk bersatu, nasionalisme yang memiliki solidaritas yang kuat. Kewaspadaan nasional juga sangat menekankan arti penting kesiagaan setiap anak bangsa berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan deteksi dini, peringatan dini, cegah dini, tangkal dini, serta tanggap dini

⁵ Bahan Ajar Kewaspadaan Nasional Lemhannas-RI (2020)

terhadap berbagai bentuk ancaman. Suatu nilai yang tidak hanya menjadi domain aparat atau negara semata, karena ancaman yang akan dihadapi adalah ancaman yang asimetrik dan menyentuh seluruh aspek kehidupan.

Tentang ancaman, sesuai pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dikatakan bahwa; Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan, Ancaman itu sendiri dapat berasal dari luar maupun dalam negeri. Kedua-duanya selalu memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi sehingga sulit untuk dapat dipisahkan. Ancaman (keamanan) tradisional yang datangnya dari luar negeri adalah invasi atau agresi dari negara lain. Berdasarkan perkiraan, ancaman dalam bentuk ini kecil kemungkinannya. Oleh karena itu perkiraan ancaman yang lebih memungkinkan adalah ancaman non tradisional (*non traditional threat*)⁶ yaitu setiap aksi yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara kesatuan RI – ancaman terhadap wawasan nusantara.⁷ Ancaman yang paling mungkin dari luar negeri terhadap Indonesia adalah kejahatan yang terorganisir yang dilakukan oleh aktor-aktor non negara untuk memperoleh keuntungan dengan memanipulasi kondisi dalam negeri dan keterbatasan aparat pemerintah yang membawa pengaruh negatif terhadap keamanan nasional dan kualitas ketahanan nasional Indonesia.

Dinamika Geopolitik

Dalam perjalanan sejarah, ketika dunia menjadi bipolar dalam ideologi setelah Perang Dunia ke II dulu, Indonesia pernah dipaksa untuk memilih salah satu dari dua kutub yang ada. Namun (dalam buku Hadi Soebadio,2002) Hatta mengatakan:

"..... but do we, the Indonesian Nation, who are struggling for the independence of our Nation and country, have to choose only to be either pro-Rusia or pro America ? Pada saat yang hampir bersamaan ketika itu, di China

⁶ Tentang hal ini banyak dibahas dalam Buku Developmen, Migration and Security in East Asia, People's Movemen and Non-Traditional Security Challenges in a Changing East Asia, edited by Dewi Fortuna Anwar The Habibie Center (THC)

⁷ Wawasan Nusantara adalah wawasan Nasional Indonesia, yaitu cara pandang Bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 tentang diri dan lingkungannya di dalam eksistensinya yang serba Nusantara didalam mengekspresikan diri ditengah-tengah lingkungan nasionalnya. Pengertian wawasan berangkat dari pengertian pada kamus umum bahasa Indonesia W.J.S Purwadarminta , bahwa yang dimaksud wawasan adalah pandangan , paham tentang suatu hal. Nusantara adalah rangkaian dari kata Nusa dan Antara . Dimaksud disini Kepulauan Indonesia sebagai kesatuan wilayah dan sebagai gugusan kepulauan antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta antara Benua Asia dengan Benua Australia. Kehadiran nelayan-nelayan China di awal 2020 yang lalu di Laut Utara Natuna adalah contoh konkrit dari ancaman terhadap Wawasan Nusantara.

sendiri Mao berkata bahwa : *"Once the conflict between the socialist soviet union and the imperialist powers grows sharper, China will have to take her stand on one side or the other. This is an inevitable trend.. the world will be swept into one or other of these front,and neutrality will then be merely a deceptive term" You lean to one side ! Precisely... so China people either lean to the side of imperialism or to be side of sosialism. To sit on the fence is impossible, a third road does not exist.*"⁸

Polarisasi dunia yang membelah masyarakat dunia ketika itu untuk memilih Komunisme atau Liberal kapitalisme sangat memaksa Indonesia yang baru saja selesai berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaannya dari tangan penjajah untuk menentukan garis ideology politiknya antara dua pilihan itu. Walau begitu, Indonesia tegas mengatakan bahwa Indonesia tidak akan berada disalah satu dari polar itu dan menempatkan diri sebagai negara non blok dengan politik bebas aktif dengan ideology Pancasila. Dengan ideology Pancasila Indonesia berkeyakinan akan mampu mewujudkan tujuan nasionalnya dalam dinamika geopolitik.

Dalam perkembangannya, saat ini globalisasi dengan modernisasi yang dijanjikan, tidak hanya membawa kemaslatan manusia tetapi dalam waktu bersamaan juga membawa ancaman terhadap kehidupan manusia. Globalisasi yang *paradox*, yang selain membawa nilai-nilai universal yang harus dipedomani bersama, namun dalam waktu yang bersamaan juga menghasilkan tribalisme yang membawa pengaruh disintegrasi dan separatisme. Kemajuan teknologi yang menjadi pemicu dan pemacu lahirnya nilai-nilai universal baru untuk dipedomani menjadi system baru ternyata dalam waktu yang bersamaan juga melahirkan resistensi mempertahankan system lama yang sudah dipedomani berabad-abad dan tidak bersedia bergeser. Akibatnya fenomena konflik terus mewarnai dunia. Lahir perang antar peradaban (*The Clash of civillition*), yang secara potensial maupun manivest juga melanda Indonesia. Indonesia kembali menghadapi ancaman dari berbagai sisi, yang pernah di formulasikan dengan istilah ekstrim kiri, ekstrim kanan dan ekstrim lainnya (Eki, Eka dan Ela). Eki, berkaitan dengan Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Eka berkaitan dengan fundamentalis agama politik sisa-sisa pemikiran DI/TII atau NII yang terus menggeliat dan berkembang bersamaan dengan fenomena kebangkitan Islam (*Islamic revivalism*) sejak 1980-an.⁹ Ela, berkaitan dengan semakin merebaknya westernisasi, new liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Isu Strategis Intoleransi Dalam Ketahanan Nasional Indonesia

⁸ Bahan Ajar Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI 2020

⁹ M Imdadun Rachmat,2005, Arus baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia

Ketahanan Nasional sering dipahami sempit sebagai pertahanan nasional. Padahal, pertahanan nasional bagian dari ketahanan nasional. Terdapat delapan *gatra* dalam ketahanan nasional, yang salah satunya adalah *gatra* pertahanan yang juga mencakup keamanan. Lemhannas atau lembaga ketahanan nasional, pada awal didirikan atau diresmikan tahun 1965, juga menyebut dirinya Lembaga Pertahanan Nasional (*defence*), namun sejak tahun 1994 berdasar Keppres RI No 4 tahun 1994, berubah menjadi Lembaga Ketahanan Nasional (*National Resilience Institute*). Hal ini sejalan dengan isi pidato Presiden Pertama RI Soekarno pada saat peresmian Lemhannas RI tanggal 20 Mei 1965, yang mengingatkan bahwa: “perang modern bukan sekedar perang militer ,melainkan peperangan yang menyangkut seluruh unsur yang dimiliki rakyat. Dengan demikian tidak hanya militer yang memperhatikan dan menyempurnakan ketahanan nasional, tetapi juga orang sipil”.

Peringatan ini sangat visioner, karena terbukti bahwa saat ini maupun kedepan, perang modern yang dihadapi oleh Indonesia maupun dunia adalah perang yang melibatkan seluruh aspek kehidupan, nir militer, komprehensif dan asimetrik. Selain itu, hal yang juga perlu dicatat bahwa, Presiden Soekarno sangat menekankan arti nasional (yang melekat dalam ketahanan nasional) sebagai yang tidak sekedar berarti seluruh bangsa, tanah air (wilayah), tetapi juga betul-betul atas konstelasi dan karakteristik dari bangsa Indonesia. Nasional yang berarti berjati diri Indonesia, dengan budaya yang dimilikinya.

Secara substansi, Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, ke berlangsung

Hasil Pengukuran Laboratorium Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI Per September 2020

Tabel 1:

No	Tingkat Ketangguhan	Warna	Angka
1	Rawan	Merah	1,00 s.d. 1,80
2	KurangTangguh	Kuning	> 1,80 s.d. 2,60
3	CukupTangguh	Hijau	> 2,60 s.d. 3,40
4	Tangguh	Biru	> 3,40 s.d. 4,20
5	SangatTangguh	Ungu	> 4,20 s.d. 5,00

Tabel 2:

Indeks Ketahanan Nasional Wilayah Nasional Per Periode

Indeks Ketahanan Nasional	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Sep-20
	Skor	Skor	Skor	Skor	Skor
INDEKS KETAHANAN NASIONAL	2,6	2,63	2,69	2,82	2,7

Gatra	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Sep-20
	Skor	Skor	Skor	Skor	Skor
GEOGRAFI	2,68	2,56	2,71	2,85	2,87
DEMOGRAFI	2,96	3,15	3,32	3,27	2,68
SUMBER KEKAYAAN ALAM	2,56	2,58	2,78	2,87	2,82
IDEOLOGI	2,06	2,06	2,44	2,56	2,42
POLITIK	2,43	2,43	2,67	2,77	2,78
EKONOMI	2,73	2,78	2,86	2,92	2,65
SOSIAL BUDAYA	2,14	2,17	2,3	2,37	2,7
PERTAHANAN DAN KEAMANAN	3,08	3,08	2,79	3,2	3,09

Dari tabel 1.2 diatas dapat dibaca bahwa indeks ketahanan nasional Indonesia secara agregat selama tiga tahun sejak tahun 2018,2019 dan September 2020 berada pada level “cukup tangguh” namun gatra ideology masih pada level “kurang tangguh” sejak lima tahun lalu (2016). Kondisi seperti ini dapat dikatakan *in line* dengan integrasi komponen bangsa dari praktek *ke-bhinekatunggal-ika-an* yang memang menunjukkan indeks ‘kurang tangguh’. Dengan kata lain, indeks ketahanan nasional Indonesia pada gatra ideology yang kurang tangguh tidak lepas dari kontribusi integrasi komponen bangsa dalam praktek *ke-bhinekatunggal ika-an* yang masih bermasalah, yang sarat dengan variabel dan indikator integrasi komponen bangsa dalam praktek *kebhinekatunggal-ika-an*, seperti praktek toleransi, solidaritas sosial, kerukunan sosial, serta indikator praktek *ke-bhinekatunggal ika-an* yang lainnya. Korelasinya, semakin baik dan benar praktek *ke-bhinekatunggal ika-an* dan integrasi komponen bangsa itu dijalankan, semakin tangguh indeks yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin tidak baik atau tidak benar praktek *ke-bhinekatunggal ika-an* integrasi komponen bangsa itu dilakukan, maka semakin kurang tangguh yang dihasilkan. Harapan ke depan, dalam rangka memperbaiki praktek *ke-bhinekatunggal ika-an*, praktek-praktek toleransi, solidaritas sosial, kerukunan sosial serta praktek yang bersifat kohesif lainnya, seharusnya mendapat perhatian lebih dalam kehidupan nasional, agar mampu menghasilkan jaminan kelangsungan kehidupan nasional sesuai amanat konstitusi.

Radikalisme, dan Bangkitnya Paham Komunisme di Indonesia

Radikalisme maupun Komunisme adalah ideology yang bertentangan dengan ideology Pancasila. Pancasila sebagai ideologi Bangsa dan Negara Indonesia adalah Pancasila yang *Philosofische grondslag*, yang menurut Bung Karno merupakan

fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka.¹⁰

Ideologi adalah sistem berpikir, sistem kepercayaan praktek-praktek simbolik yang berhubungan dengan tindakan sosial politik. (Thomson,2007). Ideologi juga dapat di definisikan sebagai seperangkat keyakinan dan paradigma pengetahuan yang menyeluruh dan sistematis yang memberikan landasan interpretasi untuk bertindak (Heywood,2012:1214 dalam Yudi Latif,2014). Ideologi adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai secara menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang suatu bangsa. Dengan demikian, ideologi merupakan landasan konseptual dalam rangka memberikan arah dan etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.(Buku Pedoman Labkurtannas, Lemhannas RI,2017)

Walau demikian, di era globalisasi, ideologi radikalisme memiliki daya pesona yang cukup kuat bagi anak muda,tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju

*“istilah revivalisme, islamisme dan fundamentalisme sering digunakan secara bergantian dalam literatur keilmuan, meskipun fundamentalisme memiliki konotasi baru di Barat yang berarti radikalisme dan terorisme.....Gerakan Kebangkitan Islam dianggap sebagai suatu rangkaian kesatuan yang dinamis antara spiritualisme pasif-apolitis dengan militansi dan radikalisme”*¹¹

Yang perlu diwaspadai adalah militansi dan radikalisme yang menggunakan jubah agama sebagai pembenaraan perjuangan politik yang sejatinya bermuara kepada perebutan kekuasaan. Sama halnya dengan radikalisme yang bermuara kepada perebutan kekuasaan, ideology komunisme dengan sejarah panjangnya di Indonesia selama pra kemerdekaan sampai dengan pasca kemerdekaan, juga memiliki agenda perebutan kekuasaan dalam perjuangan politiknya yang selain bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, juga memiliki agenda untuk mengganti ideology Pancasila. Bagaimana mungkin, Pancasila dengan nilai-nilai religiusitasnya harus diganti dengan Komunisme dengan ajaran Marxismenya yang memandang agama sebagai candu rakyat.

Atas dasar itu ketika komunisme yang dijadikan dasar perjuangan politik Partai Komunis Indonesia (PKI), secara tegas dilarang dan disebarkan di Indonesia. Dalam TAP MPRS Republik Indonesia No.XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, dinyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, terlarang dengan pertimbangan bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme; khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha

¹⁰ Pidato lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945, Pancasila Bung Karno, Himpunan Pidato, Ceramah, Kursus, dan kuliah, 2005, Tim Penerbitan Buku Pancasila, Paksi Bhineka Tunggal Ika, Jakarta

¹¹ Rahmat, M. I. (2005). *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Erlangga.

merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan. Tap MPRS ini juga sejatinya meyakini dan menunjukkan bahwa PKI memiliki keterlibatan langsung dalam Gerakan 30 September (G30S/PKI) dalam upayanya merebut kekuasaan.¹²

Bahkan ketika awal-awal reformasi tahun 1998, ketika ada upaya-upaya kelompok tertentu untuk mencabut Tap MPRS itu, lahir Undang-undang Nomor 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kajahatan Terhadap Keamanan Negara. Kelahiran undang-Undang itu harus diyakini sebagai bentuk konkrit dari kewaspadaan nasional atas bangkitnya kembali komunisme.

Fenomena Konflik Sosial

Konflik social, diartikan sebagai konflik yang potensial maupun manifest, dapat membawa dampak terhadap integrasi sosial maupun nasional. Konflik social menggunakan pendekatan wilayah, dapat berskala mulai dari lingkungan kabupaten/kota, provinsi sampai dengan nasional, yang dapat mempengaruhi kehidupan nasional, mengganggu pembangunan nasional dan merusak sendi-sendi nasionalisme NKRI. Fenomena konflik sosial sejak bergulir reformasi tahun 1998 lalu, terus mewarnai kehidupan nasional yang menghasilkan berbagai disintegrasi sosial dilingkungan komponen bangsa. Dibandingkan dengan era-era sebelumnya, sejak bergulir reformasi tahun 1998 kehidupan nasional Indonesia dirasa lebih demokratis, walau masih diwarnai oleh demokrasi yang belum matang, karena penegakan hukum dan keadilan belum optimal.¹³ Berkedok demokratisasi kegaduhan dalam wujud konflik sosial semakin menjadi-jadi di era reformasi yang menuntut demokratisasi, namun dalam prakteknya abai terhadap kebutuhan integrasi sosial dan integrasi nasional.

Proses integrasi nasional perlu didukung oleh ideologi nasionalisme. Dalam suatu bangsa yang masyarakatnya secara sosiokultural majemuk seperti Indonesia, ideologi

¹² Hermawan Sulisty, Edisi Revisi, 2017, Palu Arit di Ladang Tebu, Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan, Pensil 324, Jakarta

¹³ "Demokrasi yang terjadi di Indonesia akan terus tumbuh hingga mencapai demokrasi yang matang. Kematangan demokrasi tidak dapat dicapai tanpa penegakan hukum dan keadilan. Demokrasi yang kuat dan mapan merupakan demokrasi yang tertib dan stabil. Demokrasi yang kuat dan mapan adalah yang tumbuh sendiri (home grown), belajar dari masa lalunya, dan tentunya mengalami ups and downs. Kematangan demokrasi tidak bisa dicapai tanpa penegakan hukum dan keadilan yang tegas. Tidak ada model tunggal dalam demokrasi. Meskipun ada nilai-nilai yang bersifat universal, demokrasi juga mengandung nilai-nilai local. Tidak bisa mengimport demokrasi dari Negara manapun dan serta merta diterapkan dalam kehidupan negeri kita. Dalam demokrasi memang ada nilai-nilai universal, tetapi selalu ada nilai-nilai local, seperti nilai agama, budaya dan kekhasan lainnya. Essensi utama demokrasi ialah partisipasi rakyat dalam memikirkan dan menjalankan kehidupan sebuah bangsa. Tidak ada pertentangan antara demokrasi dan Islam. Demokrasi kompatibel dengan agam apapun" (SBY, dalam Media Indonesia, Senen, 26 November 2012. *Kematangan Demokrasi tidak bisa tanpa penegakan Hukum*)

nasionalisme perlu memberikan jawaban ideologis serta arahan terhadap strategi yang akan dianut dalam integrasi nasional. Nasionalisme merupakan suatu ideologi yang memiliki kekuatan pengaruh yang menggerakkan perasaan menjadi bagian dari sesuatu dan berfungsi membangun perasaan bagi satu komunitas nasional. Nasionalisme adalah paham nation atau paham kebangsaan. Menurut sejarahnya bagi Indonesia nasionalisme adalah counter ideologi terhadap kolonialisme, counter terhadap konservatisme serta statusquoisme kolonialisme. Maka tidaklah heran apabila pada awalnya nasionalisme kita sering bersifat radikalistik bahkan revolusioner. Oleh karena itu nasionalisme Indonesia sulit dipahami tanpa pendalaman dan pembekalan pengetahuan tentang latar belakang sejarah kolonialisme di bumi Nusantara.

Sesungguhnya nasionalisme di bumi Nusantara telah mengembrio sejak Boedi Utomo tahun 1908, lalu menemukan prinsip-prinsipnya pada Soempah Pemoeda 1928 dan terkristalisasi dalam cita-cita konkrit menuju Indonesia merdeka dan menemukan puncaknya pada proklamasi 17 Agustus 1945 yang melahirkan cita-cita nasional. Sejarah mencatat bahwa nasionalisme Indonesia mengalami pasang surut serta tiada henti menghadapi berbagai tantangan dan ancaman baik di era Orde Lama, Orde Baru maupun di Era Reformasi Pasca Orde Baru. Ancaman latennya adalah mengarah kepada disintegrasi. Kondisi ini benar-benar harus diwaspadai.

Konsep Kewaspadaan Nasional kedepan untuk mengantisipasi konflik social sesama anak bangsa.

Memperhatikan berbagai pembahasan diatas, kedepan konsep kewaspadaan nasional tidak boleh terpinggirkan dari sistem nasional. Tanpanya, negara berpotensi kehilangan dan salah arah. Ancaman disintegrasi bangsa tidak seharusnya lepas dari kawalan konsep kewaspadaan nasional, karena berpotensi membawa dampak negative terhadap keamanan nasional dan kualitas ketahanan nasional. Oleh karenanya, melalui revitalisasi kewaspadaan nasional itu, dengan melakukan rejuvenasi *bhineka tunggal ika*, diharapkan potensi disintegrasi bangsa dapat dicegah. Revitalisasi mengandung pengertian menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya, atau menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital atau mempunyai arti sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan. Rejuvenasi berarti melakukan peremajaan kembali pemahaman tentang *sesanti bhineka tunggal ika* seperti yang dikehendaki awal oleh para pendiri bangsa Indonesia.

Ada langkah-langkah konsepsional yang dapat dilakukan menuju rejuvenasi *bhineka tunggal ika*. Langkah-langkah itu meliputi ;

Pertama;

Perasaan satu komunitas nasional didalam negeri harus tetap terjaga dengan menggunakan paradigma nasional pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai acuannya.

Untuk bisa melakukan itu, penting untuk selalu menanamkan rasa empaty sesama anak bangsa untuk menumbuh suburkan relasi sosial diantara komponen bangsa. Pancasila yang pada intinya menghendaki gotong royong sangat mendambakan kesuburan empaty dalam membangun relasi sosialnya. Sesanti atau semboyan *Bhineka Tunggal Ika* yang menekankan persatuan dan kesatuan itu sejatinya terinspirasi dari falsafah *ta twam asi* ajaran *sanatana dharma* yang berarti "Itu adalah Kamu" (*that you are*) atau yang juga diartikan sebagai "Aku adakah Kamu".¹⁴ Ini sama dengan konsep "dari Kami ke Kita" yang pernah disampaikan Fuad Hassan (2005) sebagai *modes of togetherness*. Atau konsep 'Kami *within* Kita'. Oleh karena itu kesenjangan yang sangat diberbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sangat potensial membuat lunturnya perasaan satu komunitas nasional perlu mendapat perhatian yang serius. Begitu juga menyangkut keinginan masing-masing komunitas, kelompok atau golongan yang saling membenci dan meniadakan kedaulatan masing-masing.

Kedua;

Dimata Internasional Indonesia harus berani memposisikan diri sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat dengan mengacu dari kepentingan nasionalnya seperti yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 45. Keberanian yang perlu dilakukan itu berkaitan dengan langkah konkrit dari sesanti *tan hana dharma mangrva* (tiada kebenaran yang mendua) dari sesanti *bhineka tunggal ika*. Untuk bisa demikian, Indonesia harus mengetahui secara terus menerus kondisi dan situasi internasioanal yang berlaku, pada posisi mana harus berada yang dapat menguntungkan kepentingan nasional Indonesia. Harus paham tentang dinamika geopolitik dunia. Hal ini harus dilakukan karena kewaspadaan nasional merupakan manifestasi dari kepedulian serta tanggung jawab setiap komponen bangsa terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa dalam NKRI.

Penutup Simpulan

Berdasar uraian dan analisis diatas, disimpulkan bahwa;

- a. Konsep Kewaspadaan Nasional adalah konsep yang harus terus hadir dalam system penyelenggaraan negara atau system nasional kita, dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman.
- b. Ancaman nir militer yang bermuara kepada disintegrasi bangsa seharusnya disikapi dengan melakukan rejuvenasi terhadap semboyan atau sesanti bhineka tunggal ika
- c. Mengantisipasi konflik sosial yang ditandai dengan maraknya intoleransi, berkembangnya praktek politik Identitas, radikalisme dan kebangkitan komunisme,

¹⁴ Bung Karno menyinggung masalah *Tatwam Asi* ini dalam buku otobiografinya, "Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, 2001 (hal-33)

penting melakukan revitalisasi kewaspadaan nasional terhadap disintegrasi bangsa dengan melakukan rejuvenasi Bhineka Tunggal Ika, peremajaan kembali pemahaman *Bhineka Tunggal Ika*, seperti yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa, yaitu persatuan.

Daftar Bacaan

- Anderson, Benedict, 2008, *imagined communities, komunitas-komunitas terbayang*, Daniel Dhakidae pengantar, Omi Intan Naomi-penerjemah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Adams, Cindy, 2001, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Ketut Masagung Corporation, Jakarta
- Bandoro, Bantarto, 2005 Perspektif Baru Keamanan Nasional.
- Franz Magnis-Suseno, 2000, Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Gerakan Nasional Patriot Indonesia, 2004, Undang-Undang Republik Indonesia No 27 Tahun 1999, Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Sebagai Tindak Lanjut Pasal 3 Tap MPRS NO XXV Tahun 1966.
- Huntington, Samuel.P, 2000 Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia.
- Husaini, Adian, 2005 Wajah Peradaban Barat, Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal.
- Hermawan Sulisty, Edisi Revisi, 2017, Palu Arit di Ladang Tebu, Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan, Pensil 324, Jakarta
- Muladi, 2007, *"Konsep Comphrensive Security dan Ketahanan Nasional"*. Kuliah perdana Program Pasca Sarjana kerja sama Lemhannas-RI – Universitas GajahMada, Yogyakarta
- _____, 2006, "Relevansi Doktrin Ketahanan Nasional (National Resilience) terhadap Kekuatan Nasional (National Power)". *Kerangka Ceramah di KRA XXXIX Lemhannas-RI*, Jakarta
- Lemhannas –RI, Bahan Ajar Kewaspadaan Nasional , 2020
- Lemhannas-RI. Bahan Ajar Ketahanan Nasional, 2020
- Maksum (Ed), 1994, Mencari Ideologi Alternatif, Polemik Agama Pasca Ideologi Menjelang Abad 21
- Putu Sastra Wingarta, 2020, Pengantar Kewaspadaan Nasional Untuk Program Matrikulasi S2 Tannas Lemhannas-Inter Universities Net-Work
- Pancasila Bung Karno, Himpunan Pidato, Ceramah Kursus dan Kuliah. Tim Penerbitan Buku Pancasila, 2005,
- Rahmat, M. Imdadun, 2005, Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia,
- Soebadio, Hadi, 2002 Keterlibatan Australia Dalam Pemberontakan PRRI/Permesta
- Surjohadiprojo, Sajidiman, Letjen(Pur), 2005, Si Vis Pacem Para Bellum, Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif.
- Tim Penerbitan Buku Pancasila, 2005, Pancasila Bung Karno, Himpunan Pidato, Ceramah Kursus dan Kuliah.
- Hasil pengukuran Ketahanan Nasional Lemhannas RI per September Tahun 2020
- Cuplikan Pidato Presiden Pertama RI, Soekarno pada saat pembukaan Lemhannas RI, dalam Revitalisasi, Profil dan Direktori Lemhannas RI 2007